

## *Pola Konsumsi dan Beban PPN Kelas Menengah Indonesia*

Eko Wicaksono<sup>α\*</sup>, Sidiq Suryo Nugroho<sup>α</sup>, Arti Dyah Woroutami<sup>α</sup>

\* Email: [ewicaksono@kemenkeu.go.id](mailto:ewicaksono@kemenkeu.go.id)

<sup>α</sup> Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu RI

### Riwayat artikel:

- Diterima 18 Desember 2019
- Direvisi 10 Juli 2020
- Disetujui 3 Agustus 2020
- Tersedia online September 2020

### Abstract

Indonesian household final expenditure consumption continues to grow at a pace of economic growth. The aggregate household final expenditure consumption contributes to a large portion on the economic growth. The growing number of the middle-class income households will imply changes in consumption patterns which will be the driving force of the Indonesian economy and will affect the VAT and excise revenues. A regressive policy is typically imposed on VAT and excise, so it is necessary to consider the fairness on VAT and excise policies. The aim of this research is to provide evidence of middle-income class growth and consumption patterns of the middle-income class, the burden of VAT per income class based on their consumption, as well as the implications for tax policies in the future. This study uses Susenas data for July 2010, March 2014 and March 2018 from Statistics Indonesia (BPS). This research uses descriptive analysis method to explain the dynamics growth of the middle-income class in Indonesia. One of the findings in this research is number of the middle-income class in Indonesia increases, where households moving up to the middle-income class are marked by a change in their expenditure proportion. In addition, the finding shows that the VAT burden for each income class of the households is still proportional or neutral.

### Kata kunci:

konsumsi rumah tangga; kelas menengah; PPN; perpajakan; pola konsumsi; pertumbuhan

### Klasifikasi JEL:

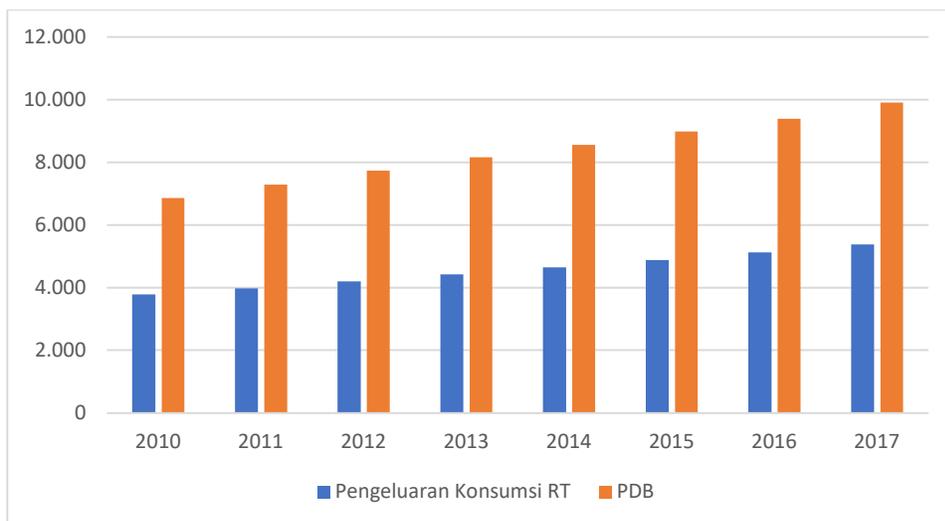
H22

## 1. LATAR BELAKANG

Konsumsi masyarakat Indonesia saat ini terus tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu studi berpendapat bahwa kenaikan kelas menengah di Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi masyarakat pada kategori ini terus mengalami pertumbuhan (Wai-Poi et.al, 2019). Keberadaan masyarakat kelas menengah bukan hanya berkontribusi pada perekonomian melalui konsumsi mereka, namun juga melalui penyediaan *entrepreneur* dan perhatian mereka pada investasi sumber daya manusia. Di sisi lain, mereka juga penopang penerimaan negara, khususnya melalui pajak tidak langsung, yang dikenakan atas konsumsi yang mereka lakukan.

Pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia, dalam hal ini pengeluaran agregat konsumsi rumah tangga, menyumbang porsi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini dapat dilihat melalui pertumbuhan PDB Indonesia dalam kurun delapan tahun terakhir. Data BPS menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi terhadap PDB rata-rata sebesar 54,37 persen pada kurun waktu tahun 2010-2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Gambar 1. Porsi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB (Rp Triliun)

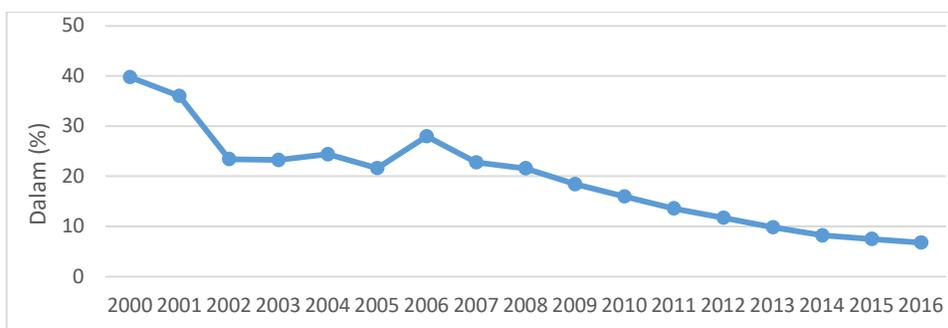


Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan Gambar 1, sejak tahun 2010 hingga 2017 pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebagai salah satu komponen penyusun perhitungan PDB, memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam perekonomian Indonesia. Perubahan yang terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tentu akan berdampak kepada fluktuasi perekonomian di Indonesia.

Tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia, yang dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin pada Gambar 2, menunjukkan penurunan sejak tahun 2000 hingga 2016. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa tingkat kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat Indonesia semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya pendapatan, ditengarai banyak masyarakat yang meningkat kelas sosial ekonominya dari masyarakat kelas pendapatan rendah berpindah ke kelompok masyarakat kelas pendapatan menengah. Kondisi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang terlihat dari perubahan kelas pendapatan masyarakat tersebut tentu akan berdampak terhadap pengeluaran konsumsi agregat rumah tangga yang juga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Gambar 2. Proporsi Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: BPS, 2018

Lebih lanjut, hasil riset yang dilakukan oleh *The Boston Consulting Group* (BCG) pada tahun 2013, menunjukkan terjadinya perubahan pola konsumsi kelas menengah di Indonesia yang ditunjukkan dengan gelombang konsumen baru kelas menengah ke atas atau *Middle and Affluent Consumer* (MAC) yang akan tumbuh baik dalam jumlah maupun daya belinya. Menurut hasil riset tersebut, perubahan diikuti oleh perubahan tren konsumsi yang bergerak dari produk kebutuhan dasar ke produk yang menawarkan kenyamanan yang lebih besar. Kategori belanja yang dilakukan kelas masyarakat ini diantaranya meliputi kategori pendidikan, renovasi rumah, barang tahan lama dan perawatan<sup>1</sup>.

Data BPS dan laporan World Bank menjadi indikasi yang kuat akan peran masyarakat pendapatan menengah pada perekonomian Indonesia ke depannya. Terlebih lagi dengan bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia pada 2025 serta kemungkinan terjadinya bonus demografi kedua, maka masyarakat kelas menengah akan menjadi penentu (*driver*) bagi perkembangan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya, dengan adanya potensi kelas menengah sebagai *driver* perekonomian, maka peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan potensi penerimaan pajak terutama PPN.

Keberadaan kelas menengah sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kelas menengah menjadi tulang punggung penerimaan negara mengingat jumlah mereka yang terus mengalami pertumbuhan. Namun, sistem perpajakan bagi kelas menengah dianggap kurang menguntungkan bagi mereka yang menjadikan mereka kelas dengan beban pajak tertinggi (OECD 2019, Leicht & Fitzgerald 2014). Sebagai contoh, terkait dengan pajak konsumsi, masyarakat berpenghasilan rendah mungkin akan menikmati banyak pembebasan (*exemption*), sementara itu masyarakat berpenghasilan tinggi bisa jadi memiliki sumber penghasilan lainnya yang dapat mengurangi beban pajak mereka secara keseluruhan.

Lebih lanjut, literatur terkait dengan pajak tidak langsung, khususnya pajak konsumsi, saat ini belum seluruhnya tiba pada sebuah kesimpulan apakah pajak tidak langsung tersebut baik menurut aspek keadilan. Sebagian menemukan bahwa pajak tidak langsung tersebut bersifat regresif (Steiner 2014; Go et. al. 2005; Haughton 2008), namun juga tidak sedikit yang menemukan bahwa pajak tersebut cenderung netral (Caspersen & Metcalf 1994; Jelema, Wai-Poi, Afkar 2017).

Kajian ini mencoba untuk memberikan sumbangan terhadap literatur terkait perpajakan dan kelas menengah melalui beberapa hal. Pertama, studi ini akan memberikan gambaran terkait pertumbuhan kelas menengah Indonesia dalam satu dekade terakhir. Kedua, studi ini akan mencoba melakukan analisis terkait bagaimana pola konsumsi masyarakat akan berubah seiring dengan perubahan kelas pendapatan. Terakhir, studi ini juga akan mengulas aspek perpajakan

<sup>1</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/13003111/Siapa.Kelas.Menengah.Indonesia>.

yang relevan dengan keberadaan kelas menengah sebagai penopang konsumsi nasional, yaitu beban PPN dan relevansi struktur PPN saat ini sebagai salah satu sumber penerimaan utama di masa yang akan datang.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Kelas menengah menjadi sumber utama pertumbuhan bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat beberapa hal yang membuat kelas tersebut menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Pertama, masyarakat kelas menengah menjadi salah satu sumber usahawan baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Acemoglu & Zilibotti, 1997). Kedua, kelas menengah menjadi sebuah 'input' bagi pengusaha karena mereka merupakan sumber dana untuk keperluan investasi melalui perilaku menabung mereka (Doepke & Zilibotti, 2008). Ketiga, kelas menengah cenderung untuk memiliki kemampuan untuk membeli dengan harga tinggi untuk sebuah kualitas dari sebuah produk (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989). Adanya permintaan akan produk yang berkualitas akan mendorong aktivitas produksi dan pemasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pada masyarakat pada seluruh kelas pendapatan. Keempat, masyarakat pada kelas pendapatan menengah menyumbangkan porsi terbesar pada konsumsi agregat yang dapat mendorong pertumbuhan industri domestik untuk menghasilkan barang produksi dalam negeri yang lebih terjangkau.

Saat ini konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 55% dari PDB Indonesia. Keberadaan masyarakat kelas menengah diperkirakan memiliki kontribusi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 20 perekonomian terbesar di dunia. Menurut PricewaterhouseCoopers (2017) Indonesia akan masuk ke dalam empat besar perekonomian dunia pada tahun 2050. Pertumbuhan kelas menengah yang diikuti dengan bonus demografi menjadi salah satu faktor kunci yang mampu mewujudkan Indonesia menjadi salah satu raksasa perekonomian dunia.

Di sisi lain, bagi pengambil kebijakan, keberadaan kelas menengah menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pertumbuhan kelas menengah mampu memperbaiki kondisi ekonomi karena dengan semakin banyaknya masyarakat pada kelas menengah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang terbebas dari belenggu kemiskinan. Kedua, pertumbuhan kelas menengah mampu memperbaiki distribusi pendapatan yang mampu memperbaiki kondisi ketimpangan yang penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Berg & Ostry, 2017). Ketiga, instrumen fiskal pemerintah, khususnya pajak, perlu untuk menyesuaikan dengan dinamika pendapatan masyarakat untuk memastikan bahwa fungsi distribusi berjalan dan menjadi faktor pendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketika melakukan identifikasi kelas menengah salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan kelas menengah tersebut. Saat ini tidak terdapat konvensi terkait dengan mereka yang disebut berada pada kelas pendapatan menengah. Secara garis besar untuk mendefinisikan kelas menengah dapat melalui pengukuran secara relatif dan absolut. Pengukuran secara relatif digunakan ketika seluruh observasi dibagi ke dalam beberapa kelas (desil/kuintil) berdasarkan peringkat dari pengeluaran atau pendapatan. Pada pengukuran relatif ini kelas pendapatan menengah didefinisikan pada mereka yang berada pada desil 5 s.d. 8 atau kuintil 3 dan 4 pada distribusi pendapatan/pengeluaran. Terdapat salah satu kelemahan dari pengukuran ini, khususnya ketika kita menggunakan data dari beberapa periode, yaitu tidak dapat ditentukan berapa proporsi masyarakat yang berpindah dari satu kelas pendapatan ke kelas pendapatan yang lain mengingat jumlah observasi untuk setiap kelas pendapatan sama.

Sementara itu pada metode pengukuran absolut pembagian kelas pendapatan didasarkan pada daya beli yang dimiliki oleh setiap kelas pendapatan tersebut. Karena penggolongan kelas pendapatan didasarkan pada daya beli, maka jumlah observasi untuk setiap kelas dapat berbeda

sehingga dapat dilihat pergeseran komposisi antar kelas pendapatan dari waktu ke waktu. Pengukuran daya beli dilakukan menurut standar internasional dimana besaran pengeluaran rumah tangga akan dibandingkan dengan ambang nilai dalam US\$ PPP. Saat ini belum ada secara pasti berapa nilai ambang yang seharusnya digunakan untuk mendefinisikan mereka yang berada pada kelas menengah. Namun, dari beberapa studi sebelumnya mendefinisikan kelas menengah sebagai mereka yang memiliki pengeluaran lebih dari US\$ 2 PPP per kapita per hari (Banerjee & Duflo 2008, ADB 2010).

Kelas pendapatan menengah memiliki kontribusi yang cukup besar pada konsumsi agregat. Beberapa studi menunjukkan bahwa setidaknya 50% konsumsi agregat disumbangkan oleh kelas menengah. Perubahan komposisi pada kelas pendapatan masyarakat, khususnya pada kelas menengah akan tercermin pula pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Seiring dengan terus meningkatnya pendapatan, maka konsumsi masyarakat akan mulai beralih pada kebutuhan sekunder dan tersier. Hal tersebut tercermin pula dari terus meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya, pertanyaan yang sering kali muncul adalah terkait dengan progresivitas dari PPN. Pajak atas konsumsi sering kali dinilai regresif karena masyarakat pada kelas pendapatan terbawah cenderung lebih banyak menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi. Dengan kata lain, proporsi beban pajak konsumsi terhadap pendapatan akan lebih besar pada masyarakat pada kelas pendapatan terbawah. Namun, progresivitas pajak atas konsumsi akan tergantung pada jenis pengukuran yang digunakan. Ketika diukur dengan menggunakan pendapatan, maka pajak atas konsumsi cenderung progresif, namun ketika diukur dengan menggunakan pendekatan pengeluaran sebagai *proxy* atas *lifetime income*, pajak atas konsumsi cenderung lebih proporsional sebagaimana ditunjukkan oleh Caspersen & Metcalf (1994). Studi yang lebih terkini di Indonesia juga menunjukkan bahwa pajak tidak langsung cenderung netral (Jellema, Wai-Poi, & Afkar, 2017).

### 3. DATA DAN METODOLOGI

Kajian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Susenas merupakan data mikro pada level rumah tangga yang dihimpun dua kali setiap tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Susenas bulan Maret mencakup kurang lebih 300.000 rumah tangga sampel, sedangkan Susenas bulan September memiliki 75.000 rumah tangga sampel. Susenas memiliki dua bagian utama yaitu keterangan pokok (kor) dan keterangan khusus (mod) dari setiap rumah tangga. Pada keterangan khusus tersebut terdapat informasi tentang pengeluaran rumah tangga tiap bulannya per jenis pengeluaran dan jenis komoditas. Data tersebut akan menjadi input utama yang akan digunakan dalam kajian ini. Untuk mendapatkan gambaran dinamika kelas menengah beserta pola konsumsinya, kajian ini akan menggunakan Susenas Juli untuk tahun 2010, Susenas Maret 2014 dan Maret 2018.

Mengingat jenis komoditi dalam kuesioner SUSENAS dapat berbeda dari tahun ke tahun, kami membuat kategori untuk setiap item yang ada dalam kuesioner tersebut. Hal tersebut dilakukan agar penggolongan jenis konsumsi konsisten dari tahun ke tahun. Salah satu permasalahan umum terkait data survei rumah tangga adalah adanya *under-reporting* pada data konsumsi. Tidak menutup kemungkinan pula hal tersebut terjadi pada SUSENAS (Hil 2000; Booth 2016).

Kami menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mengukur beban PPN, karena pengeluaran rumah tangga dianggap tidak terlalu fluktuatif. Dengan kata lain, pendekatan pengeluaran dianggap lebih relevan karena mencerminkan *life-time income* sehingga lebih relevan untuk menentukan progresivitas dari pajak pertambahan nilai (Caspersen & Metcalf, 1994).

Kajian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan dinamika kelas menengah di Indonesia. Salah satu hal penting dalam analisis ini adalah bagaimana kelas

menengah tersebut didefinisikan. Studi ini akan menggunakan kombinasi dari beberapa studi sebelumnya untuk mendefinisikan kelas menengah (Banerjee & Duflo, 2008; ADB, 2010). Pada studi ini definisi kelas menengah adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran lebih dari US\$ 2 PPP per kapita per hari. Selanjutnya, kelas pendapatan akan dibagi menjadi lima yaitu dimana masing-masing kelas dibagi sebagai berikut:

1. *Poor* (kurang dari US\$ 2 PPP per kapita per hari)
2. *Lower middle* (lebih dari US\$ 2 PPP s.d. US\$ 4 PPP per kapita per hari)
3. *Middle middle* (lebih dari US\$ 4 PPP s.d. US\$ 10 PPP per kapita per hari)
4. *Upper middle* (lebih dari US\$ 10 PPP s.d. US\$ 20 PPP per kapita per hari)
5. *Upper* (lebih dari US\$ 20 PPP per kapita per hari)

Kami menggunakan pendekatan absolut dalam mengelompokkan kelas rumah tangga dengan tujuan untuk menentukan seberapa besar jumlah rumah tangga kelas menengah di Indonesia. Hal tersebut tidak akan terjawab apabila menggunakan pendekatan relatif dengan menggunakan desil pengeluaran.

Berdasarkan pembagian kelas pendapatan tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis *incidence* PPN. Besaran beban PPN pada kajian ini didasarkan pada pengeluaran sebagai salah satu *proxy* dari *lifetime income*. Beban untuk setiap rumah tangga pada tiap kelas pendapatan tersebut dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$B_{ic} = \frac{T_{ic}}{C_{ic}}$$

Dimana  $B_{ic}$  adalah beban PPN dari rumah tangga  $i$  pada kelas pendapatan  $c$ .  $T_{ic}$  adalah besaran nominal PPN yang ditanggung oleh rumah tangga  $i$  pada kelas pendapatan  $c$ .  $C_{ic}$  adalah total konsumsi neto dari rumah tangga  $i$  pada kelas pendapatan  $c$ .

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3 menunjukkan bagaimana perubahan komposisi rumah tangga pada kelas menengah. Pada Tahun 2010 sebanyak 86% rumah tangga perkotaan telah berada di kelas menengah dengan jumlah terbanyak pada kelas *lower middle* (39.57%) dan *middle middle* (38.65%). Sementara itu jumlah rumah tangga yang masuk pada kategori *poor* relatif banyak yaitu sebesar 12.87%. Empat tahun kemudian, proporsi mereka yang berada di kelas menengah naik menjadi 91.37%. Struktur kelas menengah sendiri juga mengalami perubahan dimana komposisi terbesar kelas menengah pada saat itu berada pada kelas *middle middle* (43.22%). Porsi kelas *upper middle* pun naik dua kali lipat menjadi 15.85%. Sementara itu mereka yang berada pada kategori *poor* berkurang sangat signifikan menjadi sekitar 4%.

Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga kelas menengah di wilayah perkotaan tidak mengalami kenaikan cukup signifikan, namun struktur kelas menengahnya terus mengalami perubahan. Porsi rumah tangga pada kelas *upper middle* dan *middle middle* terus bertambah menjadi 22.7% dan 44.62% masing-masing. Di sisi lain porsi rumah tangga pada kelas *poor* terus mengalami penurunan menjadi 2.57%. Dengan demikian, struktur kelas menengah di wilayah perkotaan terus mengalami perubahan dimana pada tahun 2018 sekitar 75% masyarakat kelas menengah berada pada kategori *middle middle* dan *upper middle* sementara itu delapan tahun sebelumnya hanya separuh (50%) masyarakat kelas menengah yang berada pada kelas tersebut.

Gambar 3. Perubahan Komposisi Kelas Menengah (2010-2018)

	URBAN			RURAL		
	2010	2014	2018	2010	2014	2018
UPPER	0	4.53	6.96	0	0.25	1.29
UPPER MIDDLE	7.67	15.85	22.7	1.89	4.88	8.93
MIDDLE MIDDLE	38.65	43.22	44.62	28.63	41.98	49.75
LOWER MIDDLE	39.57	32.3	23.14	47.83	45.63	34.13
POOR	12.87	4.1	2.57	21.37	6.96	5.9

Kondisi kelas menengah pada wilayah perdesaan juga menunjukkan tren yang sama meskipun secara struktur menunjukkan sedikit perbedaan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, sekitar 21% rumah tangga berada pada kelas *poor*. Sementara itu, jumlah rumah tangga kelas menengah sebesar 78% dimana sebagian besar diantaranya (61%) berada pada kelas *lower middle*. Hal tersebut cukup kontras dengan apa yang terjadi di wilayah perkotaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

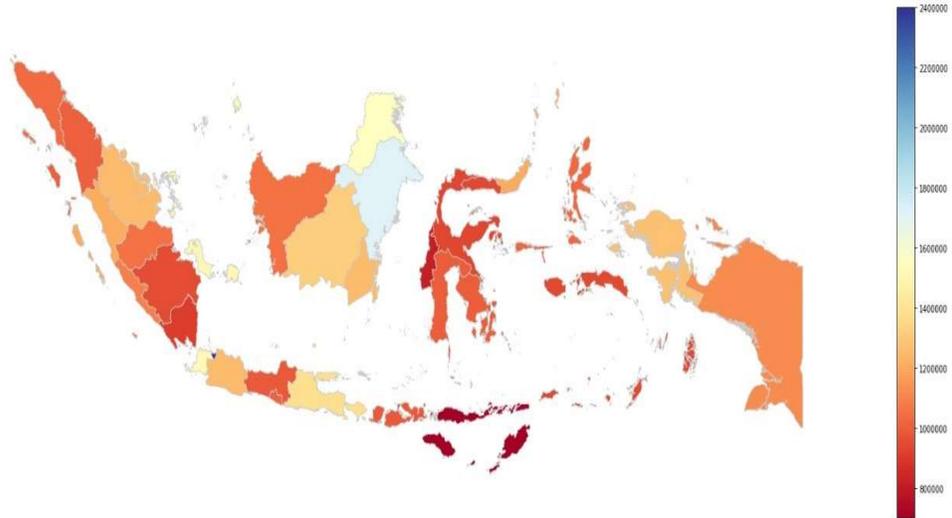
Pada tahun 2014, kelas menengah masyarakat perdesaan tumbuh cukup signifikan, dimana sekitar 92% masyarakat desa berada pada kelas menengah. Hal tersebut disertai dengan penurunan yang cukup drastis pada kelas *poor* dan transisi dari kelas *lower middle* ke *middle middle* dengan jumlah yang signifikan. Transisi tersebut terus berlanjut empat tahun kemudian sehingga masyarakat pada kelas *middle middle* menjadi bagian terbesar kelas menengah di perdesaan. Meskipun demikian, jumlah mereka yang berada pada kelas *upper middle* masih sangat minim dimana hal tersebut menjadi perbedaan kontras lainnya dengan struktur masyarakat kelas menengah perkotaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat di perkotaan jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat di kawasan perdesaan.

Adanya pergerakan menuju masyarakat kelas menengah atas perlu menjadi salah satu perhatian di masa yang akan datang. Pertama, pergerakan tersebut mampu menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian di masa yang akan datang dari nilai konsumsi mereka yang terus meningkat seiring dengan penambahan pendapatan. Kedua, semakin besarnya kelas menengah menjadi salah satu sumber penerimaan negara di masa yang akan datang khususnya bersumber dari pajak atas konsumsi seperti PPN. Terkait hal tersebut, salah satu hal yang relevan untuk dilakukan adalah identifikasi terhadap bagaimana pola masyarakat kelas menengah dalam membelanjakan sebagian besar dari pendapatan mereka. Pada bagian selanjutnya akan dibahas bagaimana pola konsumsi masyarakat berdasarkan kelas pendapatan.

#### 4.1 Kondisi Ekonomi Regional dan Rumah Tangga Kelas Menengah

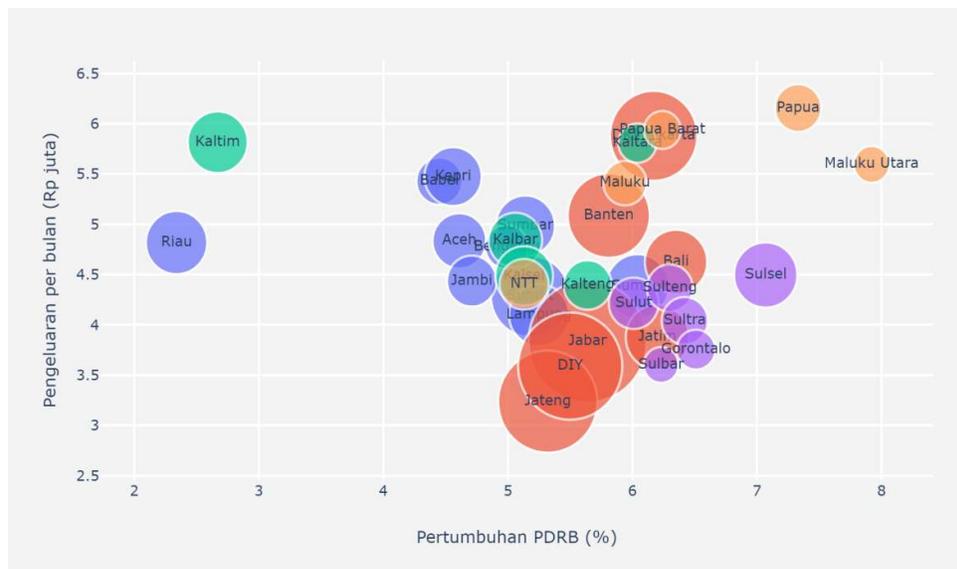
Sebagai sebuah negara berkembang dengan penduduk besar, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama perekonomian. Sebagai sebuah negara kepulauan dengan beragam suku, variasi indikator sosial dan ekonomi regional menjadi salah satu hal yang umum. Selain kondisi geografis dan kondisi demografis, adanya sentralisasi kegiatan ekonomi dan pembangunan pada masa lampau juga memiliki andil pada tingginya ketimpangan antar-wilayah.

Gambar 4. Rata-rata Pengeluaran per Kapita 2018



Gambar 4 menunjukkan variasi rata-rata pengeluaran rumah tangga antar provinsi di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi, dimana rata-rata pengeluaran setiap penduduk DKI Jakarta setiap bulannya sebesar Rp 2,4 juta. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduknya hanya sebesar Rp 750 ribu. Sementara itu, secara nasional rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Indonesia sebesar Rp 1,15 juta. Lebih lanjut, jika dikelompokkan berdasarkan wilayah kepulauan di Indonesia, data juga menunjukkan terdapat variasi pengeluaran per kapita penduduk suatu provinsi dengan provinsi lainnya yang berada pada satu pulau yang sama. Sebagai contoh, di Pulau Kalimantan cukup kontras terlihat perbedaan besaran pengeluaran per kapita antara penduduk Kalimantan bagian timur dengan Kalimantan bagian barat. Perbedaan signifikan dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing provinsi dan ditambah dengan rendahnya konektivitas antara kedua wilayah tersebut menjadi faktor penjas terjadinya ketimpangan tersebut.

Gambar 5. Pengeluaran Rumah Tangga & Pertumbuhan PDRB 2018



Pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah solusi yang dapat menurunkan ketimpangan antar wilayah. Prioritas pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia

menjadi salah satu kuncinya. Saat ini pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Gambar 5 menunjukkan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga kelas menengah. Besaran lingkaran menunjukkan seberapa banyak jumlah rumah tangga kelas menengah di provinsi tersebut. Terlihat bahwa saat ini rumah tangga kelas menengah masih terkonsentrasi di wilayah Jawa yang memiliki populasi lebih besar daripada kawasan lainnya. Kecuali DKI dan Banten, rata-rata pengeluaran per bulan rumah tangga di provinsi lainnya di Pulau Jawa berada sedikit di atas rata-rata pengeluaran per bulan secara nasional (Rp 3.9 juta). Bahkan, untuk provinsi Jawa Tengah dan DIY, pengeluaran rata-rata rumah tangga masyarakat per bulan lebih rendah dari rata-rata nasional. Adanya pembangunan infrastruktur seperti tol trans Jawa diharapkan mampu mengoptimalkan taraf hidup masyarakat di kawasan tersebut sehingga ketimpangan juga dapat dikurangi secara signifikan.

Sementara itu, beberapa wilayah di kawasan Sumatra secara umum tumbuh di bawah rata-rata nasional. Provinsi Riau sebagai provinsi terkaya akan sumber daya alam bahkan pertumbuhan PDRB-nya tidak sampai 3%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja pada sektor sekunder dan tersier perlu untuk diperhatikan. Di masa yang akan datang, kawasan Sulawesi berpotensi untuk mengalami pertumbuhan kelas menengah yang cukup tinggi mengingat kawasan tersebut saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

#### 4.2. Pola Konsumsi Rumah Tangga

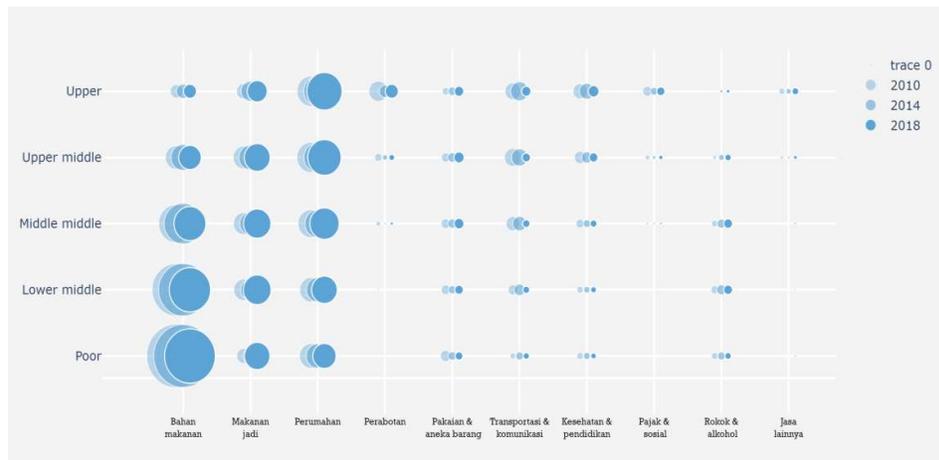
Selanjutnya, bagaimana rumah tangga membelanjakan pendapatan mereka menjadi salah satu hal menarik untuk dianalisis. Perubahan antar waktu dan kelas menjadi faktor yang juga relevan untuk diamati. Gambar 6 menunjukkan bagaimana dinamika pengeluaran pada masyarakat perkotaan membelanjakan pendapatan mereka. Rumah tangga pada kelas *poor* akan menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk keperluan makanan. Kurang lebih 60% dari pengeluaran mereka tiap bulan digunakan untuk pembelian makanan baik bahan makanan maupun makanan jadi. Sementara itu, pengeluaran untuk keperluan perumahan menjadi komponen kedua terbesar dengan besaran sekitar 16% sampai dengan 18% dari pengeluaran per bulan. Pengeluaran untuk pakaian dan aneka barang menempati urutan ketiga terbesar dengan porsi sekitar 8% dengan kecenderungan menurun. Salah satu hal yang menarik adalah porsi pengeluaran untuk rokok dan alkohol yang lebih besar dari pada porsi pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan.

Terkait dengan konsumsi makanan, pada tahun 2018 mulai terjadi pergeseran konsumsi dari bahan makanan ke makanan jadi. Pada tahun 2010 dan 2014 proporsi pengeluaran untuk makanan jadi adalah sekitar 11% dari total pengeluaran. Pada tahun 2018 proporsi pengeluaran masyarakat dalam kategori *poor* naik menjadi kurang lebih 20% dari total pengeluaran. Pergeseran tersebut juga diiringi dengan menurunnya proporsi pengeluaran untuk bahan makanan dari 46.2% di tahun 2010 menjadi 39.6% di tahun 2018.

Selanjutnya, pola yang sama terjadi pula pada rumah tangga di kelas *lower middle*. Salah satu pembeda utama dengan kelas *poor* adalah lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk transportasi. Terkait dengan hal tersebut, terdapat argumen bahwa masyarakat pada kelas menengah mulai memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil sehingga kebutuhan akan transportasi dan komunikasi menjadi salah satu unsur penting untuk menunjang aktivitas dalam bekerja (Banerjee & Duflo, 2008).

Di sisi lain, pengeluaran untuk keperluan rokok dan alkohol juga mengalami kenaikan dimana setidaknya 7% dari pengeluaran rumah tangga digunakan untuk keperluan tersebut. Jumlah tersebut melebihi pengeluaran untuk investasi sumber daya manusia yang proporsinya tidak lebih dari 5% dari total pengeluaran rumah tangga.

Gambar 6. Pola Konsumsi Rumah Tangga Perkotaan



Selanjutnya, pada kategori *middle middle*, besarnya proporsi pengeluaran untuk makanan menjadi salah satu pembeda rumah tangga pada kategori tersebut dengan rumah tangga pada kategori di bawahnya. Konsumsi makanan mulai berkurang porsinya hingga di bawah 50%. Selain mengalami penurunan porsi, terdapat pula pola perubahan pada konsumsi makanan dimana pada tahun 2018 porsi pengeluaran untuk makanan jadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sekitar 16% pada tahun 2010 menjadi 21% pada tahun 2017. Hal tersebut dapat memberikan indikasi bahwa sebagian masyarakat mulai mengalihkan sebagian pengeluaran mereka untuk keperluan *leisure* atau rekreasi melalui konsumsi makanan siap saji di restoran.

Pengeluaran untuk perumahan pada rumah tangga pada kategori *middle middle* relatif tidak berbeda dengan rumah tangga pada kelas di bawahnya dimana sekitar 16% sampai dengan 17% dari pengeluaran per bulan dialokasikan untuk keperluan perumahan dan *utilities*. Sementara itu, porsi pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi juga lebih besar apabila dibandingkan dengan rumah tangga di dua kelas terbawah meskipun mengalami penurunan dari 10% di tahun 2014 menjadi sekitar 6% di tahun 2018.

Pada kelas ini, porsi pengeluaran untuk rokok dan alkohol yang relatif tinggi. Bahkan porsi pengeluaran untuk dua kebutuhan tersebut lebih besar daripada porsi pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan pada tahun 2014 dan tahun 2018. Pengeluaran untuk rokok pun cenderung terus mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan cukai rokok dari 5% pada tahun 2010 menjadi 7% pada tahun 2018.

Transisi dari kelas *middle middle* ke *upper middle* ditandai dengan semakin mengecilnya porsi pengeluaran untuk makanan dan semakin besarnya porsi pengeluaran untuk perumahan, perabotan dan transportasi. Namun, seiring waktu hanya pengeluaran untuk perumahan yang mengalami kenaikan sedangkan dua pengeluaran terakhir cenderung turun. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya perubahan perilaku menabung di masyarakat kelas menengah atas.

Rumah tangga yang berada pada kelas teratas memiliki pola pengeluaran yang relatif sama dengan rumah tangga yang berada satu kelas di bawahnya. Salah satu pembeda utama pengeluaran rumah tangga pada kelas ini adalah semakin besarnya porsi pengeluaran untuk perumahan, perabotan, investasi sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), dan pengeluaran jasa. Namun seiring waktu, sama dengan tren yang terjadi pada kelas di bawahnya, pengeluaran untuk perabotan dan investasi sumber daya manusia mengalami penurunan porsi yang cukup signifikan. Adanya fenomena transportasi berbasis daring dan mulai

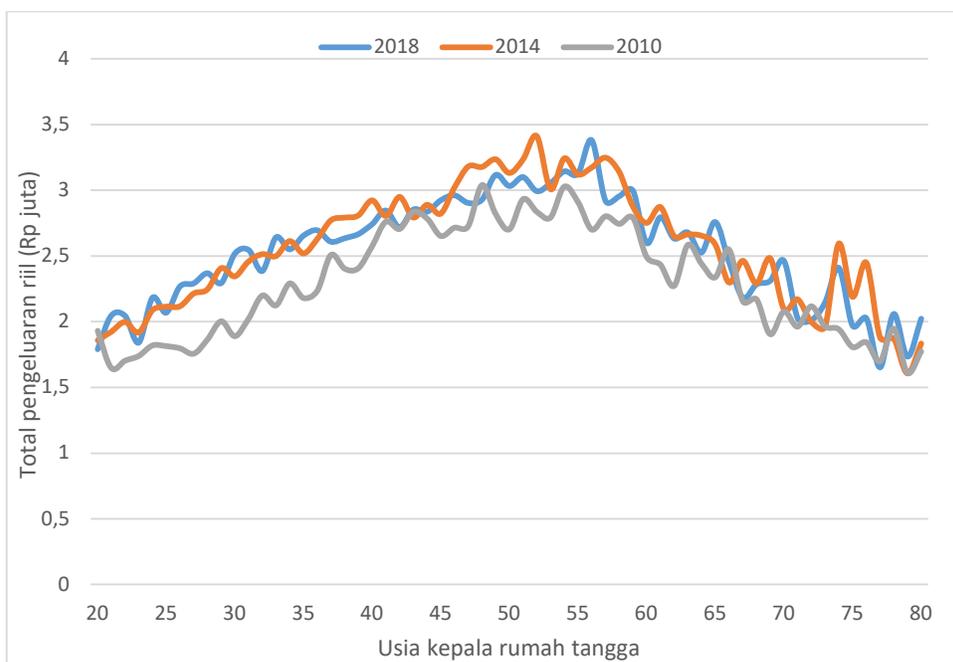
diimplementasikannya sistem jaminan kesehatan nasional menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Fenomena yang sama juga terjadi pada rumah tangga yang berada pada kelas *upper middle*. Namun, apabila hal tersebut benar maka menariknya justru kalangan rumah tangga dengan penghasilan yang lebih tinggi yang cenderung menikmati penurunan biaya pengeluaran kesehatan. Sedangkan kelas rumah tangga yang berada di bawahnya tidak mengalami perubahan porsi pengeluaran untuk kesehatan walaupun bisa saja terjadi peningkatan kualitas akses kesehatan dan pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan konsumsi rumah tangga pada periode 2010 – 2017. Pertama, seiring dengan kenaikan kelas pendapatan, porsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan akan berkurang sedangkan porsi pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi; kesehatan dan pendidikan; serta perabotan akan bertambah. Kedua, pada seluruh lapisan pendapatan terdapat pergeseran konsumsi makanan dimana porsi bahan makanan mulai berkurang dan terjadi pergeseran konsumsi atas makanan jadi atau siap saji.

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan konsumsi rumah tangga pada periode 2010 – 2018. Pertama, seiring dengan kenaikan kelas pendapatan, porsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan akan berkurang sedangkan porsi pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi; kesehatan dan pendidikan; serta perabotan akan bertambah. Kedua, pada seluruh lapisan pendapatan terdapat pergeseran konsumsi makanan dimana porsi bahan makanan mulai berkurang dan terjadi pergeseran konsumsi atas makanan jadi atau siap saji.

Gambar 7. Total Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Usia Kepala Keluarga



Gambar 7 menunjukkan hubungan antara total pengeluaran rumah tangga dengan usia kepala rumah tangga. Secara umum terlihat bahwa terjadi kenaikan total pengeluaran riil rumah tangga pada periode 2010-2018 pada semua rentang usia. Pengeluaran rumah tangga akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan usia kepala rumah tangga. Apabila ditinjau dari sisi demografi, rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia sekitar 50 tahun menjadi rumah tangga dengan total pengeluaran tertinggi.

### 4.3. Analisis Beban PPN Berbagai Kelas Pendapatan

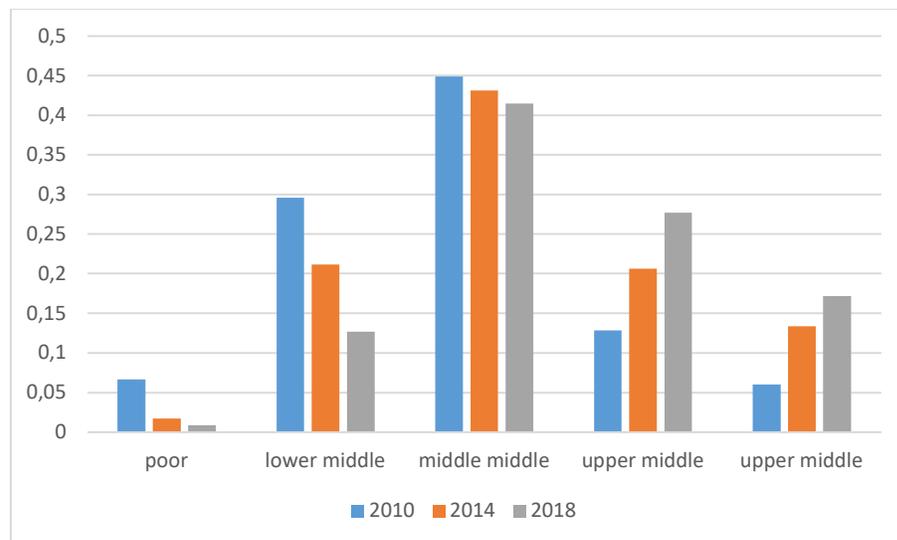
Setelah menggambarkan pola konsumsi masyarakat pada bagian sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan analisis *incidence* terhadap salah satu instrumen fiskal yang relevan dengan konsumsi masyarakat yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan salah satu pajak tidak langsung yang diterapkan di Indonesia. Sebagai salah satu pajak tidak langsung, beban atas PPN pada umumnya dibebankan kepada konsumen akhir. Tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak dimana salah satunya adalah harga jual atas sebuah produk. Namun, terdapat beberapa barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, beberapa diantaranya adalah:

1. Barang-barang kebutuhan pokok
2. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran maupun rumah makan
3. Beberapa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya

Pada analisis ini seluruh jenis komoditas dalam SUSENAS (kurang lebih 300 komoditas) akan dipilah untuk menentukan apakah komoditas tersebut termasuk objek PPN. Untuk komoditas yang menjadi objek PPN, diasumsikan telah dikenakan PPN sebesar 10% dimana PPN tersebut ditanggung seluruhnya oleh konsumen/rumah tangga. Dengan demikian, besaran PPN adalah satu per sebelas dari konsumsi atas komoditas yang menjadi objek PPN. Selanjutnya beban PPN yang ditanggung untuk setiap jenis komoditas adalah rasio antara PPN dengan harga beli komoditas dikurangi PPN nya.

Sebelum menggambarkan beban PPN yang ditanggung untuk setiap kelas pendapatan, akan digambarkan bagaimana kontribusi dari setiap kelas pendapatan terhadap penerimaan PPN nasional dengan berdasarkan asumsi bahwa pola penerimaan PPN aktual sama dengan pola penerimaan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data SUSENAS.

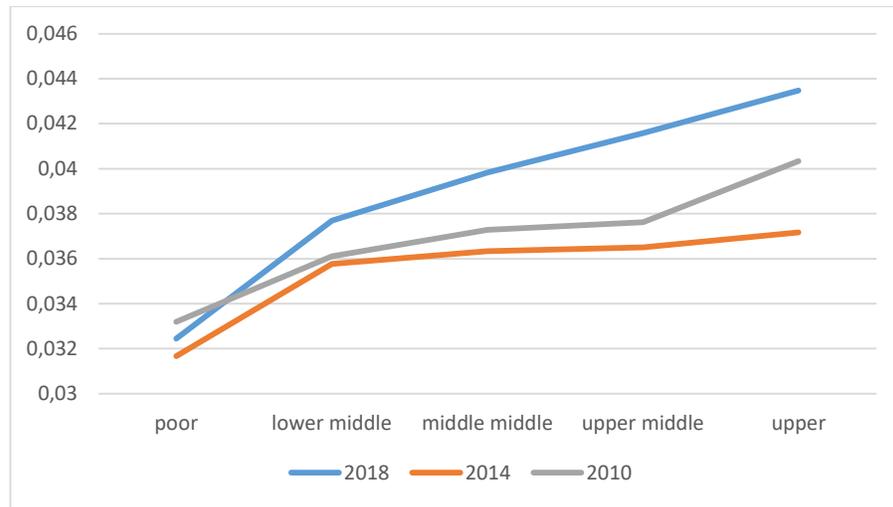
Gambar 8. Kontribusi Rumah Tangga Terhadap Penerimaan PPN



Gambar 8 menunjukkan bagaimana besaran total PPN yang disumbangkan oleh setiap kelas pendapatan. Terlihat bahwa masyarakat pada kelas menengah merupakan kontributor utama PPN dengan kontribusi rata-rata sebesar kurang lebih 43% dan kontribusinya relatif stabil pada ketiga periode observasi. Besarnya kontribusi PPN pada kelas menengah tidak terlepas dari jumlah rumah tangga pada kelas tersebut yang jauh lebih besar dari kelas lainnya. Lebih lanjut, kontribusi rumah tangga yang berada pada kelas bawah (*poor & lower middle*) terus mengalami

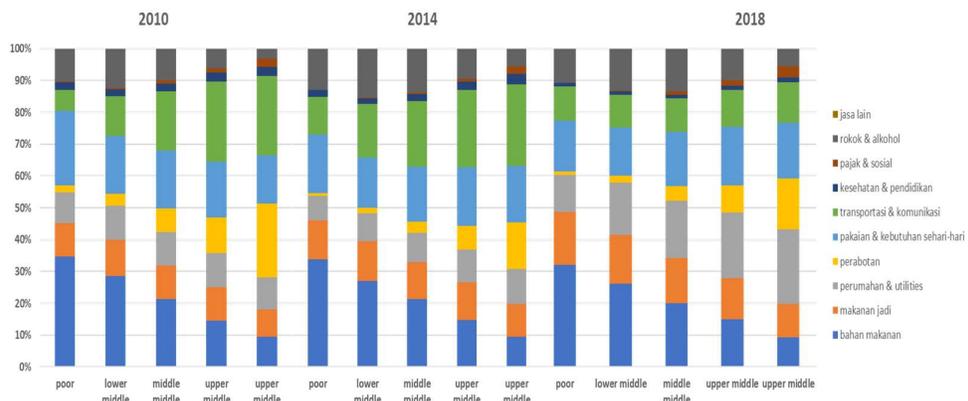
penurunan pada ketiga periode observasi. Sementara itu kontribusi rumah tangga pada kelas menengah atas (*upper middle & upper*) terus mengalami kenaikan pada ketiga periode observasi.

Gambar 9. Incidence PPN



Selanjutnya untuk melihat bagaimana progresivitas dari PPN, akan digambarkan bagaimana rata-rata beban PPN yang ditanggung oleh setiap kelas pendapatan. Gambar 9 menunjukkan rata-rata rasio antara PPN dengan total pengeluaran per bulan untuk setiap kelas pendapatan. Secara garis besar tampak bahwa PPN tidak bersifat regresif, namun cenderung lebih sedikit progresif atau proporsional. Rumah tangga pada distribusi terbawah menanggung kurang lebih 3% dari pengeluaran mereka untuk pajak konsumsi. Sementara itu rumah tangga pada bagian atas distribusi menanggung kurang lebih sebesar 4% dari pengeluaran mereka per bulan untuk PPN. Perbedaan beban antara mereka yang di bagian paling bawah dengan bagian paling atas kurang lebih hanya 1%. Dengan kata lain, secara keseluruhan PPN di Indonesia saat ini menunjukkan progresivitas yang relatif rendah atau cenderung netral. Secara umum pola tersebut menunjukkan bahwa Progresivitas PPN di tahun 2018 lebih tinggi terjadi karena perubahan pengeluaran atas perumahan yang akan dielaborasi pada bagian selanjutnya.

Gambar 10. Komposisi PPN Rumah Tangga



Apabila dilihat menurut total pengeluaran PPN cenderung netral. Namun, apabila dilihat per jenis konsumsi ada kemungkinan PPN cenderung regresif, progresif atau kombinasi dari keduanya. Gambar 10 menunjukkan komposisi PPN yang dibayarkan oleh rumah tangga berdasarkan jenis pengeluaran. Pembayaran PPN oleh rumah tangga akan bergantung pada kelas rumah tangga dan jenis pengeluarannya. Pada tahun 2010, sebagian besar PPN pada

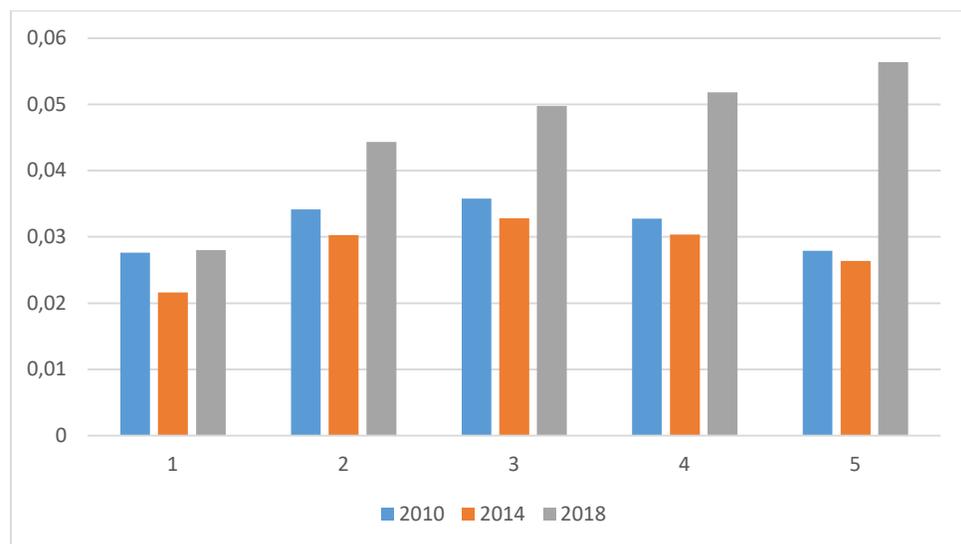
keluarga menengah ke bawah (*poor dan lower middle*) berasal dari konsumsi bahan makanan serta pakaian dan kebutuhan sehari-hari dimana masing-masing sebesar 34% dan 23%. Pola yang sama terjadi pada tahun 2014, namun PPN untuk konsumsi pakaian menurun sementara sebaliknya PPN untuk keperluan rokok dan alkohol mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 terjadi perubahan pola dimana sebagian besar PPN yang dibayarkan disumbang oleh pengeluaran perumahan.

Pada rumah tangga kelas menengah dan menengah atas (*middle middle dan upper middle*), sebagian besar PPN yang dibayarkan berasal dari pengeluaran makanan, transportasi dan pakaian. Selain itu pengeluaran PPN atas perabotan pada kelas ini juga lebih besar apabila dibandingkan dengan kelas di bawahnya. Selanjutnya, sama halnya dengan dua kelas terbawah, pengeluaran untuk perumahan menjadi kontributor terbesar total PPN yang dibayarkan pada tahun 2018.

Sementara itu, pengeluaran PPN untuk rumah tangga pada kelas teratas didominasi oleh pengeluaran perabotan dan transportasi. Pada tahun 2018, terjadi perubahan komposisi dimana sebagian besar PPN disumbangkan oleh pengeluaran perumahan yang kemudian disusul oleh pengeluaran perabotan, pakaian dan transportasi. Perubahan signifikan atas PPN pada pengeluaran perumahan tersebut menjadi alasan mengapa PPN pada tahun 2018 lebih progresif apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Secara umum, pola komposisi PPN tersebut konsisten dengan pola perubahan pengeluaran rumah tangga pada periode 2010-2018.

Secara umum, terjadi kenaikan porsi pengeluaran rumah tangga untuk perumahan pada tahun 2018. Namun, meskipun semua kelas mengalami perubahan, kenaikan porsi pengeluaran perumahan tersebut terlihat bervariasi, dimana semakin tinggi kelas rumah tangga, semakin besar kenaikan porsi pengeluarannya. Penyesuaian tarif listrik pada tahun 2015, menjadi faktor utama mengapa hal tersebut terjadi. Hal tersebut pula yang menjelaskan mengapa kurva *incidence* PPN pada tahun 2018 lebih progresif. Adanya PPN yang dikenakan pada pelanggan listrik dengan daya terpasang 6.600 VA menyebabkan porsi PPN untuk pembayaran listrik semakin besar bagi rumah tangga yang berada pada golongan tersebut, yang umumnya adalah rumah tangga menengah atas. Gambar II menjelaskan, bagaimana perubahan beban PPN untuk pengeluaran *utilities* dimana salah satu komponennya adalah pengeluaran untuk listrik. Terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi perubahan pola yang cukup signifikan, dimana PPN untuk listrik rumah tangga menengah atas semakin tinggi *rate* nya.

Gambar II. Beban PPN Rumah Tangga Untuk Pengeluaran Utilities



## 5. KESIMPULAN

Kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan kelas menengah di Indonesia. Keberadaan kelas menengah relevan dengan sumber pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang bukan hanya melalui konsumsi yang mereka hasilkan namun juga jiwa kewirausahaan yang dominan pada kelas tersebut. Melalui studi ini kami juga ingin mendapatkan gambaran terkait aspek perpajakan yang relevan dengan keberadaan kelas menengah, yaitu PPN dan relevansinya sebagai salah satu sumber penerimaan utama di masa yang akan datang.

Hasil studi ini menemukan bahwa kelas menengah terus mengalami dinamika pertumbuhan dimana pada tahun 2018 lebih 75% rumah tangga di Indonesia memiliki pengeluaran lebih dari \$US 4 PPP per kapita per hari. Sebagai perbandingan tujuh tahun sebelumnya (tahun 2010) jumlah rumah tangga dengan pengeluaran sebesar itu berjumlah kurang dari 40%. Ketika sebuah rumah tangga naik kelas menuju kelas menengah akan ditandai dengan perubahan proporsi pengeluaran dimana pengeluaran makanan akan berkurang yang diiringi dengan kenaikan porsi pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi pendidikan dan kesehatan serta perabotan. Secara umum pada seluruh kelas pendapatan terdapat pergeseran pola atas konsumsi makanan dimana porsi pengeluaran untuk makanan jadi naik secara signifikan dan diikuti dengan turunnya porsi pengeluaran untuk bahan makanan. Analisis *incidence* PPN menunjukkan bahwa secara umum beban PPN untuk tiap kelas pendapatan cenderung proporsional atau netral. Dengan kata lain, beban PPN antara kelas pendapatan terendah dengan kelas pendapatan tertinggi tidak berbeda jauh.

Dengan demikian, pertumbuhan kelas menengah menjadi salah satu sumber penerimaan negara di masa yang akan datang karena kelas menengah merupakan kontributor terbesar terhadap konsumsi agregat yang juga merupakan basis pajak terbesar untuk pajak konsumsi seperti PPN. Lebih lanjut, struktur dan tarif PPN di Indonesia masih menunjukkan tingkat progresivitas yang proporsional atau cenderung netral sehingga PPN masih cukup relevan untuk digunakan sebagai salah satu instrumen fiskal di masa yang akan datang seiring dengan terus tumbuhnya kelas menengah di Indonesia. Namun, beberapa jenis konsumsi rumah tangga memiliki pola *incidence* yang cenderung tidak proporsional, salah satunya adalah pengeluaran untuk rokok dan alkohol. Struktur dan tarif PPN untuk jenis konsumsi barang tersebut perlu untuk diperhatikan kembali dan jika perlu dikombinasikan dengan instrumen lainnya untuk mengendalikan konsumsi atas barang tersebut.

Mengingat studi ini dilakukan dengan menggunakan data survei rumah tangga yang memiliki potensi permasalahan pada nilai konsumsi yang *underreported*, pada studi selanjutnya disarankan untuk dapat mempertimbangkan penggunaan data rumah tangga yang dikombinasikan dengan data spasial penjualan barang konsumsi masyarakat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan pola konsumsi masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Zilibotti, F. (1997). Was Prometheus unbound by chance? Risk, diversification, and growth. *Journal of Political Economy*, 105(4), 709–751. <https://doi.org/10.1086/262091>
- ADB. (2010). *Special Chapter: The Rise of Asia's Middle Class in Key Indicators for Asia and the Pacific*. (August). Retrieved from <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/27726/ki2010-special-chapter.pdf>
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2008). What is middle class about the middle classes around the world? *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 3–28. <https://doi.org/10.1257/jep.22.2.3>
- Berg, A. G., & Ostry, J. D. (2017). Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? *IMF Economic Review*, 65(4), 792–815. <https://doi.org/10.1057/s41308-017-0030-8>

- Booth, A. (2016). *Economic change in modern Indonesia: Colonial and post-colonial comparisons*. Cambridge University Press.
- Caspersen, E., & Metcalf, G. (1994). Is a Value Added Tax Regressive? Annual Versus Lifetime Incidence Measures. *National Tax Journal*, 47(4), 731–746.
- Doepke, M., & Zilibotti, F. (2008). Occupational Choice and The Spirit of Capitalism. *Quarterly Journal of Economics*, (May).
- Go, Delfin S.; Kearney, Marna; Robinson, Sherman; Thierfelder, Karen. 2005. An Analysis of South Africa's Value Added Tax. *Policy Research Working Paper; No. 3671. World Bank, Washington, DC.* © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8630> License: CC BY 3.0 IGO
- Haughton, J. (2008). *Taxation in Vietnam: Who Pays What?*. Unpublished. For World Bank, Hanoi.
- Hill, H. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge University Press.
- Jellema, J., Wai-Poi, M., & Afkar, R. (2017). The Distributional Impact of Fiscal Policy in Indonesia. In *The Distributional Impact of Taxes and Transfers: Evidence From Eight Developing Countries* (pp. 179–198). [https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1091-6\\_ch6](https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1091-6_ch6)
- Leicht, K., Fitzgerald, S. (2014). *Middle Class Meltdown in America*. New York: Routledge, <https://doi.org/10.4324/9781315885506>
- Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1989). *Industrialization and the Big Push* Authors ( s ): Kevin M . Murphy , Andrei Shleifer and Robert W . Vishny Published by : The University of Chicago Press Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/1831884> Accessed : 27-03-2016 04 : 55 UTC Your use of the JS. *Journal of Political Economy*, 97(5), 1003–1026.
- OECD (2019). *Under Pressure: The Squeezed Middle Class*, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/689afed1-en>.
- PricewaterhouseCoopers, L. L. P. (2017). *The World in 2050 : How will the global*.
- Steiner , Roberto. Taxation and economic growth in Colombia / Roberto Steiner . p. cm. — (*IDB Working Paper Series ; 493*)
- Wai-Poi, M. G., Alatas, H., Indrakesuma, T. R., Janz, E., Tiwari, S., & Uochi, I. (2019). *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class* (No. AUS0000182, pp. 1-222). The World Bank.